

PENTINGNYA PENDIDIKAN PERBANKAN UNTUK MENGATASI KELANGKAAN MODAL DALAM PENGEMBANGAN UMKM

Setiadi Umar

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

Abstract

According to the Ministry of Trade and Industry of the Republic of Indonesia (Deperindag), there are problems faced by Small Medium Enterprise(s) (SMEs) to develop themselves. Some of these problems are the insufficiency capital, limited knowledge, uncompetitive financing schemes, and lack of education of the SME's owners aggravating the problem. This paper discusses the condition of Indonesian banking and other financial institutions as well as capital conditions, the condition of SME(s) and the needs of financial and business education for SMEs. Finally, this paper suggests alternative solutions to the problem.

Keywords: *Small Medium Enterprises (SME)s, SMEs development, SMEs Business Education, Indonesian Banks and LDR, Private sector development.*

Pendahuluan

UMKM di Indonesia, menurut Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali, memberikan kontribusi sebesar 1.778.7 triliun atau 53.3% dari GDP Indonesia, Peningkatan 10% dari kinerja UMKM ini berarti akan meningkatkan GDP saat ini sebesar 5%, suatu angka yang besar, mengingat pertumbuhan GDP Indonesia saat ini hanya sekitar 6% per tahun. Disamping itu, UMKM menyerap 85,4 juta orang atau 96,18 persen terhadap seluruh tenaga kerja yang bekerja di Indonesia. Kemajuan UMKM dapat berarti pemecahan masalah bagi pengangguran di Indonesia.

Dalam salah satu halaman METI (Kementrian Perdagangan dan Industri Jepang) disebut bahwa industri kecil-menengah atau *chuushoukigyō* atau secara umum banyak orang mengenal dengan SME (*small medium enterprise*) berperan sangat besar dalam ekonomi Jepang, termasuk tentunya ekonomi-ekonomi kotanya. SME ini menyumbang 99.7% kegiatan industri Jepang, menyedot sekitar 70% sektor tenaga kerja Jepang, dengan volume penjualan mencapai 40-60% dari keseluruhan industri. Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa peran UMKM Indonesia, meskipun vital peranannya dalam perekonomian Indonesia, namun perannya masih tertinggal jauh dengan UMKM di negara tetangga. Sadar akan pentingnya peranan UMKM dalam suatu negara, kita perlu menanyakan langkah apa yang perlu dilakukan agar kontribusi UMKM didalam GDP menjadi makin besar, seperti negara - negara lainnya?

Kendala dalam pengembangan UMKM

Menurut Deperindag, ada beberapa masalah yang telah teridentifikasi dan perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan yang dihadapi pengembangan UMKM dapat adalah keterbatasan modal untuk melakukan perbaikan / peningkatan teknologi, serta lemahnya akses serta terbatasnya informasi tentang sumber teknologi dan pengetahuan tertentu. Skim pembiayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk pembelian mesin-mesin baru untuk UMKM masih terbatas. Misalnya masalah *leasing* dan sewa beli masih terbatas, dan belum banyak dimanfaatkan oleh UMKM karena tidak kompetitif.

Namun, sebenarnya masalah yang dihadapi UMKM tidak hanya itu, 59.87%¹ dari populasi Indonesia yang berumur lebih dari 10 tahun belum melewati pendidikan SD. Disamping itu, menurut data yang didapat dari penelitian Bambang Setiarso di tahun 2001, menunjukkan bahwa 65.3% dari pengusaha nonformal berpendidikan SD kebawah dan hanya 1.6% yang berpendidikan sarjana muda atau diploma III keatas. Sekedar informasi 75%² dari penduduk Indonesia bergerak di sektor non formal. Pada sektor industri pengolahan pangan juga tidak menunjukan gambaran yang lebih baik. Sebagian besar dari jumlah pengusaha kecil di sektor tersebut yang maksimum berpendidikan SD mencapai angka 80%, dan yang berpendidikan tersier (DIII/Sarjana Muda) keatas, kurang dari 1 %. Bila data ini masih dapat diandalkan pada masa sekarang ini, maka hal ini berarti tenaga kerja yang terdidik yang tersedia baik untuk berusaha sendiri atau memimpin sebuah UMKM, ataupun sebagai sumber daya manusia pada umumnya sangat sedikit. Tentu saja sumber daya manusia yang menguasai secara spesifik hal-hal yang berhubungan dengan keuangan seperti pengaturan keuangan, pembuatan laporan keuangan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan pinjaman dana lebih sedikit. Disamping itu rendahnya tingkat pendidikan ini dapat membuat penerimaan / adaptasi proses pembaharuan dalam UMKM terutama dalam menerima pengetahuan baru menjadi lebih sulit. Kesulitan dapat timbul dari masalah dalam pemahaman bahasa, istilah baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa inggris, dan tentu saja komunikasi.

Melihat masalah diatas, tampaknya masalah yang telah teridentifikasi oleh deperindag, bisa jadi juga disebabkan oleh masalah kurangnya pendidikan atau kurangnya pengetahuan mengenai keuangan dan perbankan. Keterbatasan pengetahuan ini tentu tidak hanya mempersulit pengusaha UMKM dalam mengajukan kredit, namun juga pihak perbankan dalam menyediakan kredit, apalagi dengan biaya yang murah. Ketidak jelasan data tentu saja sangat mempersulit pihak perbankan dalam melakukan evaluasi resiko sehingga pihak bank harus

¹ Badan Pusat Statistik 2006

² CLSA - Market outlook Indonesia, 15 Agustus 2007

mengenakan premium untuk mengkompensasikan resiko yang dirasakannya dan menyebabkan tingkat bunga yang tidak kompetitif. Hal ini tentu saja serta meningkatkan biaya bagi peminjam dana.

Sehingga dari sini terlihat bahwa kurangnya pengetahuanlah yang merupakan salah satu penyebab kinerja UMKM di Indonesia lebih rendah dibandingkan kinerja UMKM di negara-negara maju.

Disamping itu, penyebaran institusi keuangan yang tidak merata juga mempersulit penyaluran dan penyediaan dana ke dan di daerah. Disamping itu, proses pengajuan pinjaman yang dibutuhkan untuk mengembangkan UMKM menjadi lebih sulit, terutama di daerah-daerah yang tidak terlayani oleh institusi keuangan. Tentu saja hal ini menghambat pergerakan kemajuan perekonomian daerah tersebut.

Dari sini tampak bahwa kurangnya pengetahuan dan tingkat pendidikan pengusaha UMKM, serta minimnya tenaga kerja yang memiliki pengetahuan mengenai perbankan dan ketersediaan institusi keuangan yang berperan dalam menyumbang masalah yang telah teridentifikasi oleh deperindag, seperti terbatasnya modal bagi UMKM dan tidak kompetitifnya skim pembiayaan serta biaya itu sendiri. Namun sebelum kita mengambil kesimpulan ini ada baiknya kita melihat dahulu mengenai kondisi permodalan dan perbankan kita.

Kondisi Perbankan dan Permodalan di Indonesia

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini termuat di dalam Undang-Undang Perbankan³ Pasal 1 angka 1. Fungsi utama perbankan⁴ di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya perbankan di Indonesia haruslah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan termasuk di dalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan yang kadang disebut Financial Deepening yang dalam pelaksanaannya tergantung dari tingkat kemajuan perbankan. Semakin maju suatu bank, maka semakin besar pula manifestasi bank tersebut. Di negara maju seperti Amerika Serikat, persentase usaha perkreditannya (LDR) di bidang perbankan rata-rata sebesar 91%, sehingga dapat dibilang bahwa dana yang disimpan oleh pihak ketiga 91%-nya digunakan untuk menyumbang atau menggerakkan perekonomian.

Namun berdasarkan catatan dari Bank Indonesia, perbankan di Indonesia mengalami kelebihan dana, dan kelebihan dana ini makin

³ <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Undang-undang+BI/>

⁴ <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/lkhtisar+Perbankan/Lembaga+Perbankan/>

besar setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan yang makin besar dari tahun ke tahun antara jumlah simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang dimiliki oleh perbankan dan jumlah yang dikucurkan untuk kredit (lihat Tabel 1). Meskipun angka LDR yang terakhir menunjukkan angka yang lebih baik namun masih termasuk rendah, apalagi bila dibandingkan dengan LDR negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara. Untuk sebagai perbandingan marilah kita melihat angka LDR terendah yang pernah dicapai dari negara-negara di Asia Tenggara. Seperti Thailand angka LDR yang terendah yang pernah tercapai adalah 80%, Singapore, 85%, Taiwan, 85%, Malaysia 80%, Filipina 63%, dan Korea 75%. LDR rata-rata terendah negara-negara di Asia namun tidak termasuk Jepang adalah 76%. (Wood 2004)

Tabel 1.

Tahun	Dana Pihak Ketiga (triliun rupiah)	Kredit (triliun rupiah)	LDR (persen)
1997	358	378	106
1998	573	487	85
1999	626	225	36
2000	720	269	37
2001	809	308	38
2002	836	410	49
2003	902	477	53
2004	963	595	62
2005	1128	730	65
2006	1287	833	65
2007*	1354	904	67

*Juni

Sumber : Bank Indonesia.

Dari perbandingan diatas, terlihat bahwa tingkat LDR Indonesia sangat rendah, meskipun tingkat LDR dapat berarti bagus ataupun buruk. Dengan rendahnya tingkat LDR Indonesia, hal ini dapat berarti kurangnya permintaan akan kredit, sulitnya pemberian kredit oleh perbankan, kehati-hatian bank, sulitnya melakukan pengajuan kredit yang mungkin dapat disebabkan oleh ketidak tahuan masyarakat mengenai sistem perbankan terutama sebagai penunjang usaha mereka, ketidak tahuan masyarakat mengenai cara pengajuan kredit ataupun tidak lengkapnya surat yang diperlukan. Namun hal ini dapat pula diartikan tersedianya cukup dana dalam sistem perbankan untuk dikucurkan terutama untuk mengakomodir naiknya permintaan kredit ketika biaya modal ini (yang biasanya ditentukan oleh tingkat suku bunga) menurun.

Namun biar bagaimanapun, rendahnya LDR, dan melimpahnya dana dari pihak ke tiga ini tidak berarti bahwa perbankan perlu melunakan persyaratan dalam pemberian kreditnya, atau menjadi lebih tidak berhati-hati untuk meningkatkan tingkat LDR ini.

Telah banyak kejadian-kejadian yang membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Di Indonesia masalah kredit macet, yang dalam istilah perbankan disebut dengan Non Performing Loan (NPL), menduduki posisi tertinggi yakni 34%. Persentase ini adalah perbandingan antara kredit macet atau bermasalah dengan total pemberian kredit perbankan. Rasio NPL terhadap total loan tersebut di Korea Selatan 19%, Malaysia 33% dan Thailand 61%. Makin tinggi bahaya atas kredit macet yakni tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dihadapi oleh bank, maka makin turun pula tingkat kesehatan dan nilai bank tersebut, terutama dalam ukuran tingkat likuiditas keuangan dan solvabilitasnya. Dimana tingkat likuiditas dan solvabilitas ini mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah dan calon nasabah. Karena tingkat likuiditas ini sangat mempengaruhi kemampuan bank tersebut dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik tanpa melakukan penjualan asset dan tingkat solvabilitas adalah kemampuan bank tersebut dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan mengandalkan asset yang dimilikinya. Disamping itu, semakin besar jumlah kredit yang bermasalah, dapat berarti semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan oleh bank tersebut dan hal ini meningkatkan biaya dan resiko yang menjadi tanggungan bank tersebut.

Meskipun rendahnya LDR membuat bahaya yang disebabkan oleh tingkat likuiditas ini menjadi sangat kecil, namun hal ini tidak berarti bahwa pihak perbankan dapat memberikan kredit secara serampangan. Pihak perbankan harus tetap minimal mempertahankan pelaksanaan prosedur 5C dalam memberikan pinjaman pada calon nasabah dan nasabahnya dan sama sekali tidak melonggarkannya.

Disamping itu, data lain yang perlu diperhatikan adalah data ketidak merataan tingkat NPL (*non performing loan*) dan LDR (*loan to deposit ratio*) di berbagai daerah. Dimana tingginya NPL mencerminkan resiko yang lebih tinggi dalam memberikan pinjaman di daerah tersebut. Musim masuk sekolah atau karena istri melahirkan merupakan salah satu dari sekian penyebab gagal bayar yang umum terjadi. Sedangkan tingkat LDR yang rendah, dapat mencerminkan ketidak tahuan masyarakat tentang fungsi perbankan sebagai penunjang usaha dan mungkin mengandalkan sumber pinjaman lain seperti lintah darat untuk membiayai usahanya.

Namun yang menarik di sini adalah, meskipun keterbatasan modal telah diidentifikasi sebagai salah satu kendala dalam meningkatkan kinerja UMKM, namun berdasarkan tabel dan ulasan diatas terlihat bahwa tingkat LDR Indonesia adalah rendah. Hal ini menyiratkan bahwa banyak modal kerja yang menganggur.

Namun, yang lebih menarik, angka LDR yang rendah ini, disertai juga dengan tingkat NPL yang tinggi dan juga dengan tingkat kredit investasi yang rendah. Jauh lebih banyak kredit yang digunakan untuk konsumsi dibandingkan untuk berinvestasi, dan tingkat gagal bayarnya tinggi.

Jadi sekali lagi, ada kemungkinan bahwa tingkat pengetahuan pelaku usaha, UMKM khususnya mengenai pengaturan keuangan, pengajuan pinjaman dan perbankan, yang masih kurangnya yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat LDR dan tidak berkembangnya UMKM di Indonesia. Disamping itu ketidak mampuan mengelola keuangan dapat menjadi salah satu penyebab tingkat NPL yang terjadi. Celaknya angka NPL, terutama untuk BPR, saat ini terus meningkat.

Dukungan institusi keuangan dan pendidikan keuangan.

Ketersediaan institusi keuangan unit khusus yang diperuntukan untuk pengembangan UMKM, yang mengenal kondisi lokal, sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha UMKM di daerah. Mungkin bentuk-bentuk institusi keuangan yang ada seperti BPR dan koperasi dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam mewujudkan hal ini. Karena kebutuhan untuk memperoleh dana di daerah akan lebih mudah dipenuhi bila tersedia unit-unit khusus pembiayaan di daerah-daerah tersebut. Hal ini berarti penyebaran BPR, meskipun sudah cukup baik di pulau Jawa, masih perlu diperluas di pulau-pulau lainnya, karena keberadaannya masih sangat terbatas.

Namun yang lebih penting adalah pemberian pendidikan, pelatihan ataupun penyuluhan mengenai perbankan, keuangan, bisnis dan manajemen kepada pengusaha dan tenaga kerja lokal UMKM. Sehingga dapat menghasilkan pengusaha-pengusaha UMKM yang berwawasan bisnis yang profesional dan dapat memisahkan antara untuk kebutuhan bisnis dan untuk kebutuhan keluarga.

Keberadaan peta NPL (*non performing loan*) & LDR (*loan to deposit ratio*) terutama yang berasal dari BPR dapat menjadi panduan bagi BI untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan, daerah-daerah mana yang masih memerlukan pendidikan ini. Dengan demikian tingkat LDR dapat ditingkatkan dan NPL dapat dikurangi. Disamping itu dengan turunnya tingkat NPL ini, atau dengan bertambahnya jumlah kredit yang sehat, persepsi akan resiko atas pemberian kredit pada UMKM-pun dapat menurun. Dengan turunnya tingkat persepsi akan resiko UMKM ini, dapat berarti biaya modal yang dikenakan untuk daerah tersebut dapat diturunkan dari tarif rata-rata yang berlaku pada saat ini, yaitu 24%.

Namun, tidak hanya itu peran BPR. Kredit investasi, kredit yang dapat menggerakkan sektor riil, yang diberikan oleh BPR saat ini, masih dalam porsi yang terlalu kecil, dibandingkan kredit jangka pendek dan kredit konsumtif. Perlu diambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan hal ini sehingga dengan demikian dengan turunnya suku bunga tidak hanya meningkatkan kredit konsumsi, namun juga kredit investasi.

Pengajuan kredit investasi perlu diperjelas dan dipermudah. Namun dipermudah tidak dalam arti dipermudah dalam hal-hal yang dapat meningkatkan resiko kredit perbankan. Karena perlu diperhatikan bahwa dari 43 juta unit UKM, hanya 13% yang *bankable* (memiliki jaminan) dan dapat mengajukan kredit investasi. Mungkin perlu dipikirkan bentuk lain yang dapat digunakan untuk pembiayaan investasi ini, seperti bentuk *leasing* dan sewa beli misalnya. Dimana pada kredit jenis ini, barang yang dibeli, selain berguna untuk keperluan usaha, juga dapat dipergunakan sebagai jaminan. Disamping itu pengarahannya bahwa perbankan tidak hanya dapat digunakan untuk mengatasi masalah konsumsi dan keperluan jangka pendek, tetapi dapat juga digunakan sebagai penunjang kepentingan usaha juga, sangat perlu dilakukan.

Institusi keuangan dan pendidikan yang bernuansa user friendly dan bernuansa lokal

Sebenarnya permasalahan yang pertama kali harus dipecahkan sebelum kita dapat memperkenalkan perbankan pada UMKM Indonesia adalah membuat perbankan dan penyuluhan atau pendidikan tersebut dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan, sederhana dan mudah dimengerti oleh UMKM di Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan diiringi dengan beragamnya bahasa, dialek dan budaya Indonesia, serta kebiasaan dalam menggunakan sistem ijon dan rentenir yang jauh lebih mudah dalam persyaratan administrasinya memberikan tantangan tersendiri dalam usaha memperkenalkan sistem perbankan ini.

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dalam memperoleh maupun membagi pengetahuan juga perlu diperhatikan. Akan lebih baik bila menggunakan sarana dan prasarana yang telah mereka kenal, atau dalam bentuk lain yang mereka inginkan. Penggunaan sarana yang "*user friendly*" seperti rembuk desa /*sharing* dan penyuluhan oleh tenaga ahli ataupun oleh staf dari pihak perbankan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan.

Namun tenaga ahli dan staf perbankan yang perlu disediakan adalah harus mereka yang menguasai bahasa lokal. Disamping itu tenaga ahli atau staff ini harus dapat pula meneruskan informasi yang didapatnya, baik itu berupa permasalahan, keluhan, pertanyaan, serta pengetahuan dari UMKM lokal ke kantor pusat ataupun kepada knowledge centre yang berfungsi sebagai pusat pengolah informasi dalam bahasa yang dipakai umum dan tidak membingungkan. Informasi berharga ini dapat digunakan oleh kantor pusat ataupun pemerintahan sebagai masukan untuk pengembangan UMKM dan perbankan daerah lebih lanjut.

Singkat kata, pengenalan perbankan maupun pemberian ilmu / *transfer knowledge* lainnya harus dilakukan dengan cara yang sederhana dan kental dengan suasana lokal, agar mudah dimengerti atau dapat terjadi kesalah pahaman. Sehingga, pertukaran informasi tidak akan menjadi sesuatu yang sangat sulit dan membuat frustrasi.

Meningkatkan peranan swasta dalam perekonomian.

Luasnya daerah Indonesia, dan banyaknya sarana dan pra sarana yang perlu dibangun, tidak memungkinkan untuk menyerahkan pembangunan ini untuk seluruhnya ditanggung oleh negara. Disamping itu, Bila hal ini terjadi, akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif. Yang pertama adalah kemajuan daerah apalagi yang berlokasi di pelosok Indonesia harus menunggu waktu yang sangat lama, karena terbatasnya dana APBN yang tersedia. Yang kedua, pembangunan akan mengikuti skala prioritas dan bukan karena perkembangan pasar, sehingga dapat terjadi ketimpangan pembangunan. Yang Ketiga biaya pembangunan yang terjadi dapat menjadi sangat besar, karena ada kemungkinan biaya "tambahan" yang dikenakan oleh oknum-oknum tertentu baik dari kontraktor, pemerintahan maupun dari perbankan. Yang keempat adalah adanya kemungkinan bahwa apa yang dibangun bukanlah apa yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat lokal tersebut (seperti apa yang telah terjadi dalam kasus R&D di negara kita. R&D yang terpusat pada pemerintah, menghasilkan banyak hasil R&D yang ternyata tidak dibutuhkan oleh dunia usaha) dan yang terakhir adalah, bila proyek-proyek tersebut dibiayai oleh pinjaman luar negeri, dapat membuat negara kita terpuruk ke dalam hutang luar negeri, seperti yang pernah terjadi pada periode yang lalu.

Oleh karena itu, pembangunan sarana dan pra sarana ini akan jauh lebih baik bila memasukan unsur swasta dalam hal ini adalah UMKM kedalamnya. Hal ini tidak berarti peran pemerintah dapat berkurang, atau dapat lepas tangan dari pembangunan sarana dan prasarana ini. Peran pemerintah sebagai regulator dan pemberi insentif masih diperlukan untuk menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif yang dapat menarik sektor swasta untuk bergerak dibidang tersebut. Pemberian kredit lunak, pemotongan pajak, kepastian hukum, pemberantasan pungli, hanyalah sedikit dari banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan suasana investasi.

Namun bagaimana kita bisa membuat pihak swasta membangun di bidang-bidang atau di daerah-daerah yang kurang menguntungkan? Memang, mungkin akan sangat mahal untuk membuat jaringan internet di seluruh Indonesia, membangun jalan dan komunikasi, listrik ke seluruh pelosok Indonesia, namun tidak terlalu mahal biaya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah internet cafe, sebuah *tower Base Transceiver Station* (BTS), untuk membangun 10 km jalan raya, dan sebuah generator sederhana. Dimana semua ini dapat ditanggung oleh seorang, atau beberapa orang wirausahawan yang berjiwa wirausaha yang dapat mendapatkan keuntungan dari sana yang mungkin kecil di saat ini, tapi dapat meningkat ketika perekonomian daerah tersebut meningkat.

Dengan adanya jalan raya, dan komunikasi, akan membuat petani dapat menjual hasil usahanya di pasar yang lebih jauh, dengan harga yang lebih tinggi. Dengan adanya Pembangkit listrik, Pabrik sederhana/ *home industries* dan UMKM lainnya dapat berkembang, hasil alam dapat ditingkatkan nilainya, pengetahuan bisa lebih gampang diperoleh. Hal ini berarti peningkatan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, berarti dapat mengembangkan desa itu lebih lanjut, lebih banyak UMKM yang dibuat, UMKM yang ada menjadi lebih efisien, dan mungkin setelah itu terdapat permintaan atau kebutuhan akan sarana dan prasarana yang lebih maju. Pengusaha UMKM dapat meningkatkan daya dari pembangkit listriknya, BTS dapat ditambah, jalan diperlebar, bahkan mungkin sudah waktunya untuk memulai membangun fasilitas lain seperti lapangan terbang sederhana atau pelabuhan yang sesuai dengan kebutuhan dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Hal yang sederhana ini dapat menjadi besar, bila di setiap desa dan setiap UMKM terdapat semangat berusaha dan berinovasi seperti ini. Dengan demikian perkembangan, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan.

Dengan adanya potensi keuntungan, baik itu yang segera terjadi atau yang akan terjadi dengan adanya sarana dan prasarana, berarti terdapat permintaan untuk fasilitas tersebut. Dan bila diiringi dengan biaya pendirian fasilitas sederhana seperti pendirian sebuah BTS atau generator sederhana yang dapat dijangkau oleh pengusaha, seharusnya dapat menjadi insentif yang kuat bagi para wirausahawan dan atau bagi para pemakai (yang akan mendapatkan keuntungan tersebut) untuk mendirikan fasilitas tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana ini dapat diorganisir dan ditanggung secara bersama-sama oleh sesama pemakai atau juga bisa dibantu oleh investor / *entrepreneur* yang lain dan mungkin juga dengan pemerintah daerah (pemda) bila mungkin. Disini berarti pemakai, selain juga bertindak sebagai pembeli / pengguna, dapat juga bertindak sebagai pemegang saham / pemilik fasilitas. Selain itu, di daerah yang asas kegotong royongannya masih kuat, dapat mendorong biaya pendirian fasilitas ini menjadi makin terjangkau.

Disamping peranannya dalam pembangunan ekonomi, sarana dan pra sarana ini, seperti BTS, listrik, dan internet cafe, juga dapat memberikan penghasilan dan keuntungan bagi dirinya sendiri, dimana keuntungan ini dapat ditahan untuk ekspansi selanjutnya atau dibagikan kembali sebagai deviden kepada para pemegang sahamnya.

Kesimpulan dan Saran.

Pengembangan UMKM dapat menjadi pendorong yang vital dalam meningkatkan tingkat GDP Indonesia. Investasi dalam pengembangan SDM, dan membuat sumber daya tersebut lebih dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, dan menjadi partisipan yang berwawasan terutama berwawasan bisnis dan mengerti keuangan yang

memungkinkan dia mengelola usahanya dengan lebih profesional, dan dapat menangkap peluang untuk mengembangkannya serta mengajukan kredit pada bank dan bukan pada rentenir disaat dia membutuhkannya. Disamping itu, pengetahuan ini juga dapat membantu pengusaha UMKM dalam mengatur keuangannya, baik untuk kebutuhan keluarganya maupun bisnisnya. Namun supaya hal ini dapat tercapai, diperlukan ketersediaan institusi keuangan di daerah dan juga pendidikan untuk pengusaha UMKM. Agar pengusaha UMKM ini dapat memanfaatkan ketersediaan institusi keuangan yang berada diaerahnya tersebut. Peta distribusi tingkat LDR dan NPL dapat membantu sebagai panduan prioritas diberikannya pendidikan ini. Ilmu yang lebih luas seperti ilmu hukum, bisnis, keuangan, manajemen, manajemen SDM, dan pemasaran juga dapat diberikan sebagai pelengkap untuk mempertajam bisnis sense para pengusaha UMKM ini. Meskipun tetap harus dalam bentuk yang sederhana dan penuh nuansa lokal. Pengusaha harus dibekali pengetahuan yang cukup agar tidak perlu menjalani trial dan error yang menyakitkan untuk menemukan roda yang ke dua kalinya.

Disamping itu, ketersediaan sarana dan prasaranapun harus diperhatikan. Ketidak tersediaan sarana dan prasarana dpat menyebabkan bisnis tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun karena terbatasnya kas negara dan banyaknya agenda negara, menyebabkan kita tidak dapat menggantungkan pembuatan sarana dan prasarana ini kepada negara, karena opportunity cost yang ditanggung sangatlah besar. Dengan menunggu uluran tangan negara, berarti akan membuat kita makin jauh tertinggal (terutama dalam bidang teknologi) dan dengan begitu memperlambat proses roda ekonomi. Sementara, yang namanya teknologi, inflasi, dan pertumbuhan penduduk, sama sekali tidak berhenti bertumbuh dan berkembang. Oleh karena itu perlu dicari alternatif pembiayaan yang lain, yaitu sektor swasta. Pemberian insentif dan grant untuk mendorong pihak swasta berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana ini merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan.

Daftar Pustaka

- Anwar, Khaerul 2003, *Modal, Masalah Klasik Perajin Sandal Antaka*, Kompas, 10 Juli 2003
- Bank Indonesia 2006, *Statistik Bank Perkreditan rakyat (BPR)*, Bank Indonesia, Oktober 2006
- Balitbang 2007, *Wapres minta perbankan adil terhadap ukm*, <http://balitbang.depkominfo.go.id>, 09 Mei 2007
- Bank Indonesia, *"Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat"*, Bank Indonesia.
- Basri, Faisal 2007, *10 tahun setelah krisis: membangun kekuatan baru*, seminar AMA bandung, 27 Juli 2007.
- Beerens, Eric 2007, *Inequality in Indonesian higher education a real threat*, The Jakarta Post, 21 Juli 2007.

- Bell, M & Pavitt, K 1997, *Technological accumulation and industrial growth: contrasts between developed and developing countries*, dalam buku: D. Archibugi and J. Michie (eds), *Technology, Globalisation and Economic Performance*; Cambridge: Cambridge University Press, 1997, pp. 83-137.
- Berita Resmi statistik no. 42/IX/14 Agustus 2006
- Bontis, N. 1999. *Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and advancing the state of the field*, *International Journal of Technology Management*, 18, 5/6/7/8, 433-462.
- Cashmore, Nicholas 2007, *Indonesia Market Outlook*, CLSA, 15 Agustus 2007
- Kompas 2007, *Bank BUMN Jadi Tumpuan Harapan*, Kompas 5 July 2007.
- Kompas 2007, *BPR Minta Dilibatkan Program Pemberdayaan*, Kompas 20 July 2007.
- Kompas 2006, *Kredit Macet BPR Meningkat*, Kompas, 28 Maret 2006
- Kompas Cybermedia 2007, *Giliran Perbankan Mulai Kucurkan Kredit UMKM*, Kompas Cybermedia, 17 Maret 2007
- Kompas Cybermedia 2007, *Pemerintah belum berpihak pada UMKM*, Kompas Cybermedia, 6 Juli 2007.
- Kompas Cybermedia 2007, *Uang Korupsi di Asia mencapai 35 Persen dari PDB*, Kompas Cybermedia, 13 Juli 2007.
- Masykur, M. F. 2007, *Forum APEC 25 perlu lahirkan strategi jitu UKM*, *Bisnis Indonesia Online*, 28 Agustus 2007.
- Nafte, Tony 2007, *Indonesia Economics*, CLSA, 16 Agustus 2007
- Niosi, J., P. Saviotti, B. Bellon and M. Crow 1993, *National Systems of Innovation: In Search of A Workable Concept*, *Technology in Society*, New York, Elsevier Science, 15 (2) 1993 : pp. 207-27.
- Okezone.com, *Antisipasi NPL, BPR Kurangi Kredit Konsumsi*, 15 Mei 2008,
<http://economy.okezone.com/index.php/read/2008/05/15/21/109666/antisipasi-npl-bpr-kurangi-kredit-konsumsi>
- Portal Nasional 2007, *UKM Sumbang 53,3 Persen Total PDB Indonesia 2006*, portal nasional Indonesia, 20 Maret 2007,
<http://www.indonesia.go.id/>
- Porter, Michael E 1990, *The Competitive Advantage of Nations*, New York: Free Press, 1990.
- Senker, J. 1996, *National systems of innovation, organizational learning and industrial biotechnology*, *Technovation*, Vol 16, No. 5, May 1996 hal. 219 – 229.
- Setiarso, Bambang, *Berbagi pengetahuan: Siapa yang mengelola pengetahuan?*, Komunitas e-learning.com.

- Setiarso 2006, Bambang, *Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge-Management) dan Modal Intelektual (Intellectual Capital) untuk pemberdayaan UKM*, Konferensi Teknologi Informasi dan Komunikasi ke 2, Bandung, 3 – 4 Mei 2006.
- Setiarso, Bambang, *Strategi Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge-Management) untuk meningkatkan daya saing pada klaster industri mikro, kecil, dan menengah (IMKM)*, Komnuitas eLearning Ilmu komputer.com
- Setiarso, Bambang, *Knowledge Mangement dan Knowledge Sharing Bidang Pangan: Studi Kasus Bidang Perkebunan*, Artikel Populer IlmuKomputer.com
- Surya live, *Kredit Macet BPR Terus Memburuk, Per Februari 2009 Rp 170 M*, 6 April 2009, <http://www.surya.co.id/2009/04/06/kredit-macet-bpr-terus-memburuk-per-februari-2009-rp-170-m.html>
- UNDP 2001, *Human Development Report 2001: Making new technologies work for human development*, New York, UNDP, 2001
- Utomo, Marsudi B. 2007, *Hutang Luar Negeri Melilit UKM*, www.beritaiptek.com, 30 Oktober 2006
- Wood 2004, *Greed and Fear*, CLSA Report, July 29, 2004.
www.bi.go.id
www.depperin.go.id
www.economist.com
www.imd.ch/wcy/
- Zuckerman, Ethan 2007, *Building big, starting small, A radical new way for poor countries to get the phones, power, and roads they need*, The Boston Globe, August 5 2007